

Stigma Demonstrasi Sebagai Aksi Makar

Renita

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: renita@gmail.com

Abstrak

Masyarakat di sekeliling kita tentunya ada yang memiliki stigma terhadap demonstrasi sebagai aksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang melatarbelakangi terjadinya stigma di masyarakat dan untuk mencari solusi agar stigma tersebut bisa hilang. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode survei dengan menyebarkan form kuesioner kemedial sosial lalu diambil 7 sampel dimuali dari tanggal 15-16 Juni 2020. Semua responden berjenis kelamin perempuan dan sebagian besar seorang mahasiswa. Rata-rata responden memiliki stigma karena faktor kebanyakan bersumber dari persepsi responden mengenai proses demonstrasi berlangsung, seperti tidak sepemikiran lalu menekan pihak terkait untuk kepentingan pribadi, dan keraguan pada pasal yang mengatur demonstrasi. Responden juga memberi solusi berupa dalam segi demonstrasi untuk melakukan demonstrasi secara tertib sesuai aturan yang telah disahkan, penyuluhan tata cara demonstrasi agar masyarakat mengetahui kode etiknya, penegakkan aturan secara tegas bagi pelanggar, dan menanamkan sifat positif dalam berpikir dan menyikapi.

Kata Kunci: Stigma, Demonstrasi, Makar



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu hambatan paling besar dalam kepercayaan masyarakat terhadap demonstrasi adalah masih adanya stigma yang tak kunjung hilang dari benak masyarakat (Riyanti et al., 2024). Stigma berasal dari dalam pola pikir seseorang atau suatu masyarakat yang mengira bahwa demonstrasi adalah tindakan yang mudah mendapat campur tangan dari pihak lain untuk menjalankan aksi makar dan dalam pelaksanaannya kerap meresahkan (Senjiliana et al., 2023). Stigma pada demonstrasi tergambar dalam sikap resah, ketakutan, dan marah berlebihan saat demonstrasi berlangsung. Mereka juga berpendapat bahwa demonstrasi sebagai aksi makar hanya menambah kerugian keberbagai pihak, misalnya saja saat ada demonstrasi besar besaran pedagang kaki lima yang biasa jualan di tempat tersebut jadi takut dan menunda untuk berjualan, akibatnya penjual merugi. Hal yang membuat stigma pada demonstrasi sebagai aksi makar adalah adanya ketidaksesuaian pada aturan yang kerap terjadi dalam proses pelaksanaannya, misalnya pada kasus demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang menolak sejumlah RUU dan UU KPK pada Selasa, 24 September 2019 berujung ricuh diakibatkan melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Ada juga bukti demonstrasi yang memakan korban, yaitu pada tanggal 30 September 2019 sore tepatnya di depan Gedung DPR ricuh dan menyebabkan seorang polisi luka karena lemparan batu.

Dengan pengetahuan yang minim atau kurang maka stigma demonstrasi masih tetap terjadi di lingkungan masyarakat. Contoh dari stigma demonstrasi adalah ketika ada demonstrasi, tempat yang ada disekitar kejadian ditutup rapat-rapat karena takut akan terkena dampak jika terjadi kericuhan, masyarakat juga memilih untuk tidak mendekati lokasi demonstrasi bertindak karena takut terseret-seret jika ada permasalahan dan mereka takut kalau ikut terprovokasi. Ada juga masyarakat yang tidak memberi stigma pada demonstrasi sebagai aksi makar namun jika diminta untuk turut andil dalam demonstrasi mereka masih ragu dan perlu pikir Panjang untuk memutuskan hal tersebut (Sugiarti & Riyanto, 2024).

Berdasarkan informasi dan data tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan dengan memiliki tujuan untuk menganalisis faktor penyebab munculnya stigma terhadap demonstrasi sebagai aksi makar dimasyarakat dan mencari solusi untuk menghilangkan stigma yang menempel dalam benak masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan atau edukasi bagi semua pihak agar bersama-sama berusaha menghilangkan stigma melalui beberapa solusi yang ada pada mini riset ini.

Kajian Teori

Stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungan (KBBI). Stigma dipergunakan didalam istilah “stigma sosial” yaitu pikiran, keyakinan dan bahkan keyakinan negatif yang diterima seseorang dari komunitas atau lingkungan dalam bentuk pelabelan, stereotip, pemisahan, serta diskriminasi dengan nilai negatif yang memengaruhi citra individu atau kegiatan secara keseluruhan. Stigma ini diciptakan oleh masyarakat ketika melihat sesuatu yang dianggap menyimpang atau aneh karena tidak seperti biasanya. Demonstrasi adalah pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara (Sang et al., 2018). Pada sistem pemerintahan demorkasi mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Peran serta itu bisa diwakilkan atau secara langsung dalam perumusan, pengembangan dan penetapan undang-undang. Aksi makar adalah akal busuk, tipu muslihat, perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintah yang sah. Secara umum, makar dapat diartikan sebagai suatu rencana tersembunyi yang teguh untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pencipta makar kepada sasarannya dengan cara tidak terduga. Makar merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan masalah keamanan negara. Terdapat banyak faktor yang melatarnelakangi seseorang melakukan tindak pidana makar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode survei untuk mendapatkan hasil riset dalam bentuk opini atau pendapat dari orang lain. Tujuan utama metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum sampel beberapa orang tentang stigma demonstrasi sebagai aksi makar dan cara menghilangkan stigma tersebut. Menurut (Chotimah, 2016) kuesioner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pengambilan sampel dilakukan selama dua hari, yaitu tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 16 Juni 2020. Cara pengambilan sample adalah dengan membuat kuesioner pada google form yang kemudian link akan saya sebarakan melalui media sosial yang saya punya, kali ini saya memanfaatkan penyebaran link kuesioner menggunakan aplikasi WhatsApp. Sample yang akan saya ambil berjumlah 7 orang dengan opini dan pendapat paling nyambung dengan topik yang saya tanyakan. Stigma tentang demonstrasi sebagai aksi makar diukur berdasarkan beberapa pertanyaan dalam form kuesioner yang disebar. Adapun pertanyaannya adalah opini tentang factor penyebab stigma muncul pada diri mereka sendiri, serta ada satu pertanyaan yang berhubungan dengan pencarian solusi agar stigma tersebut hilang, yaitu bagaimana cara untuk menghilangkan stigma menurut diri mereka sendiri.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggapan hasil dari menyebar google form ke media sosial, sebagai berikut:

1. Responden 1: Rias Nesti Nugrahani seorang mahasiswa di Universitas Tarumanagara memiliki pendapat:

- a. Menurut anda apa yang menyebabkan demonstrasi dapat dikatakan/dikaitkan sebagai aksi makar? Jawab: Penyebabnya adalah ketidaksesuaian pikiran atau pendapat, dilihat dari tujuan demonstrasi sendiri yaitu menyampaikan pendapat atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.
- b. Menurut anda bagaimana cara untuk melepaskan stigma tersebut dari demonstrasi? Jawab: Melakukan demonstrasi dengan tertib (tanpa melibatkan kekerasan) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara tsb.
2. Responden 2: Eri Setianingsih seorang mahasiswa di Universitas Tarumanagara memiliki pendapat:
 - a. Menurut anda apa yang menyebabkan demonstrasi dapat dikatakan/dikaitkan sebagai aksi makar? Jawab: Demonstrasi merupakan gerakan aksi protes karena tidak setuju dengan suatu kebijakan.
 - b. Menurut anda bagaimana cara untuk melepaskan stigma tersebut dari demonstrasi? Jawab: Para demonstrans harus mengerti dan menyadari bahwasannya harus melaksanakan unjuk rasa dengan mengeluarkan pendapat secara tertib dan tidak berlebihan atau merusak lingkungan.
3. Responden 3. Unay Hanifah Khansa Azizi seorang mahasiswa di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta memiliki pendapat:
 - a. Menurut anda apa yang menyebabkan demonstrasi dapat dikatakan/dikaitkan sebagai aksi makar? Jawab: Penggunaan istilah makar sebenarnya menggantikan "aanslaag". Kemungkinan demonstrasi dikatakan makar (penggulingan pemerintah/penyerangan) karena adanya bentrok yang sudah terencana, sehingga demonstrasi bukan lagi sebagai wujud kebebasan berekspresi malah untuk rusuh. Namun faktanya penerapan pasal makar dari dulu kurang jelas karena penafsiran makna makar sendiri yang juga kurang jelas.
 - b. Menurut anda bagaimana cara untuk melepaskan stigma tersebut dari demonstrasi? Jawab: Melepaskan stigma negatif istilah makar dalam demonstrasi memang sulit karena ketidakjelasan makna sesungguhnya. Namun untuk tindakan preventif bisa melakukan pemahaman lebih lanjut mengenai makna makar sehingga tidak salah arti, melakukan pencegahan kerusuhan, demonstrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan, dan perlu dukungan pemerintah dalam upaya penegakan pasal makar.
4. Responden 4: Aprilia Nur Rahmawati seorang mahasiswa di IKIP PGRI Wates memiliki pendapat:
 - a. Menurut anda apa yang menyebabkan demonstrasi dapat dikatakan/dikaitkan sebagai aksi makar? Jawab: Menurut saya, stigma ini muncul dikarenakan seperti yang dapat kita lihat pada aksi-aksi demonstrasi yang terjadi di sekitar kita selalu dikait-kaitkan dengan politik/pemerintahan. Jadi aksi demonstrasi yang terjadi seperti ada suatu pihak atau aktor(yang mungkin kontra dengan pemerintah) yang memang berniat untuk mengarahkan dan menyangkut pautkan ke pemerintahan.
 - b. Menurut anda bagaimana cara untuk melepaskan stigma tersebut dari demonstrasi? Jawab: Menurut saya ini dapat dilakukan oleh kelompok demonstran itu, mereka harus fokus pada titik permasalahan yang mereka angkat, jangan mudah terprovokator, sehingga aksi demonstran tetap berjalan dengan baik.
5. Responden 5: Tumiyati seorang mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta memiliki pendapat:
 - a. Menurut anda apa yang menyebabkan demonstrasi dapat dikatakan/dikaitkan sebagai aksi makar? Jawab: Menurut saya, yang menyebabkan demonstrasi dikaitkan dengan

makar yaitu dengan adanya niat atau kesengajaan dalam demonstrasi, adanya rencana saat melakukan demonstrasi (karena niat dan rencana itu merupakan syarat terjadinya makar), dan bisa juga karena saat demonstrasi terjadi kekerasan atau adanya korban jiwa.

- b. Menurut anda bagaimana cara untuk melepaskan stigma tersebut dari demonstrasi? Jawab: Caranya dengan menjelaskan kembali bahwa demonstrasi itu adalah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum, bukan merupakan tindakan kesengajaan untuk menyerang keamanan presiden, wakil presiden, ataupun negara dan keutuhan negara.
6. Responden 6: Waridatun seorang mahasiswa di Universitas Gajah Mada memiliki pendapat:
- a. Menurut anda apa yang menyebabkan demonstrasi dapat dikatakan/dikaitkan sebagai aksi makar? Jawab: Demonstrasi bisa dikatakan atau dikaitkan sebagai aksi makar dikarenakan telah terbentuknya stigma masyarakat yang mengatakan bahwa demonstrasi adalah aksi makar. Aksi demonstrasi dilakukan untuk menyuarakan pendapat masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan yang telah dibuat pemerintah, atau bisa juga untuk menegakkan keadilan, dll. Aksi menyuarakan pendapat bukan berarti untuk menurunkan pemerintahan. Namun, dalam demonstrasi terkadang terdapat sekelompok orang yang memang memanfaatkan gelombang demonstrasi untuk melakukan aksi makar. Hal itulah yang menyebabkan demonstrasi sering dikaitkan dengan aksi makar.
- b. Menurut anda bagaimana cara untuk melepaskan stigma tersebut dari demonstrasi? Jawab: Cara melepaskan stigma tersebut harus dimulai dari pemerintah. Pemerintah harus bisa melepaskan stigma bahwa demonstrasi adalah aksi makar. Pemerintah harus menyadari bahwa demonstrasi ini dilakukan sebagai aksi protes (menyuarakan pendapat masyarakat) dan tentunya sebagai negara demokrasi pemerintah harus bisa terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat. Jika pemerintah sendiri telah bisa melepaskan stigma tersebut maka perlahan lahan masyarakat juga bisa mengerti bahwa demonstrasi bukan merupakan aksi makar.
7. Responden 7: Astuti seorang guru di SMPN 2 Panjatan memiliki pendapat:
- a. Menurut anda apa yang menyebabkan demonstrasi dapat dikatakan/dikaitkan sebagai aksi makar? Jawab: Beberapa pendapat atau tindakan yang menyimpang dari keinginan atau peraturan yang berlaku, sehingga muncul gerakan berupa demonstrasi mengumpulkan masa yang ingin mengembalikan tatanan ke kondisi yang sesuai aturan. Kadang sampai ingin menggulirkan tahta pemerintahan kalau masalah itu sudah mengenai inti sebuah negara.
- b. Menurut anda bagaimana cara untuk melepaskan stigma tersebut dari demonstrasi? Jawab: Demonstrasi harus berlandaskan bineka tunggal ika. Mengedepankan demokrasi dengan aturan yang berlaku serta cara penyampaian yang pas. Sehingga keinginan semua pihak yang terkait dapat menemukan titik terang.

Stigma terhadap demonstrasi sebagai aksi makar dalam penelitian ini adalah keyakinan negatif yang diterima seseorang dari komunitas atau lingkungan dalam bentuk pelabelan, stereotip, pemisahan, serta diskriminasi dengan nilai negatif yang memengaruhi citra individu atau kegiatan secara keseluruhan (Obi et al., 2022). Topik pembahasan di mini riset ini adalah mengidentifikasi faktor yang melatarbelakangi munculnya stigma demonstrasi sebagai aksi makar dalam diri individu dan untuk mencari solusi agar stigma tersebut bisa hilang. Dari jawaban responden yang telah saya kumpulkan, rata-rata mereka berpendapat jika stigma muncul karena ketidaksesuaian pikiran atau pendapat, dilihat dari tujuan demonstrasi sendiri yaitu menyampaikan pendapat atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan

kelompok, pada aksi-aksi demonstrasi yang terjadi di sekitar kita selalu dikait-kaitkan dengan politik/pemerintahan. Jadi aksi demonstrasi yang terjadi seperti ada suatu pihak atau aktor(yang mungkin kontra dengan pemerintah) yang memang berniat untuk mengarahkan dan menyangkut pautkan ke pemerintahan, dalam demonstrasi terkadang terdapat sekelompok orang yang memang memanfaatkan gelombang demonstrasi untuk melakukan aksi makar, adanya rencana saat melakukan demonstrasi(karena niat dan rencana itu merupakan syarat terjadinya makar), dan bisa juga karena saat demonstrasi terjadi kekerasan atau adanya korban jiwa.

Pemahaman tentang UU yang mengikat, proses pelaksanaan demonstrasi mulai dari tata cara pelaksanaan dari awal sampai akhir, dan banyaknya berita yang menayangkan keriuhan dan jatuhnya korban saat demonstrasi berlangsung dapat menimbulkan pertanyaan dan kesalahpahaman mengenai demonstrasi sebagai aksi makar (Wibowo et al., 2024). Guna menangani kesalahpahaman agar tidak berlangsung lama, maka dalam kuesioner juga terdapat pertanyaan mengenai pendapat responden tentang solusi yang tepat. Solusi yang diberikan oleh responden beragam, misalnya saja Melakukan demonstrasi dengan tertib (tanpa melibatkan kekerasan) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tindakan preventif bisa melakukan pemahaman lebih lanjut mengenai makna makar sehingga tidak salah arti, melakukan pencegahan kerusakan, demonstrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan, dan perlu dukungan pemerintah dalam upaya penegakan pasal makar, mereka harus fokus pada titik permasalahan yang mereka angkat, jangan mudah terprovokator, sehingga aksi demonstrasi tetap berjalan dengan baik, yang terakhir demonstrasi harus berlandaskan bineka tunggal ika. Mengedepankan demokrasi dengan aturan yang berlaku serta cara penyampaian yang pas. Sehingga keinginan semua pihak yang terkait dapat menemukan titik terang. Pada dasarnya, semua masyarakat dan pihak berwenang tanpa pengecualian, sangat berperan penting dalam menghilangkan stigma demonstrasi sebagai aksi makar. Kita harus saling bekerja sama mulai dari pemerintah yang memberi tindakan preventif sebelum demonstrasi berlangsung, masyarakat yang berdemo juga harus melaksanakan sesuai peraturan UU yang berlaku, serta masyarakat dirumah yang siap mendukung dan berdoa agar proses demonstrasi berjalan lancar dan mendapat keputusan terbaik. Karena dalam kitab Sutasoma karya Mpu Tantular tertulis semboyan 'bineka tunggal ika' yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.

KESIMPULAN

Faktor yang mempengaruhi stigma terhadap demonstrasi sebagai aksi makar adalah kebanyakan bersumber dari persepsi responden mengenai proses demonstrasi berlangsung, seperti tidak sepemikiran lalu menekan pihak terkait untuk kepentingan pribadi, dan keraguan pada pasal yang mengatur demonstrasi. Solusi yang dikemukakan untuk menghilangkan stigma adalah dalam segi demonstrasi untuk melakukan demonstrasi secara tertib sesuai aturan yang telah disahkan, penyuluhan tata cara demonstrasi agar masyarakat mengetahui kode etiknya, penegakkan aturan secara tegas bagi pelanggar, dan menanamkan sifat positif dalam berpikir dan menyikapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chotimah, H. C. (2016). Identitas Nasional dan Norma Internasional Sebagai Pertimbangan Politik Indonesia dalam Merespons Aksi dan Jaringan Terorisme Global. *Jurnal Politica*, 7(2), 189–209, hlm 193. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1131>
- Obi, B. I. N., Eze, T. I., & Chibuzo, N. F. (2022). Experiential learning activities in business education for developing 21st century competencies. *Journal of Education for Business*, 97(1), 36–42. <https://doi.org/10.1080/08832323.2021.1884521>

- Riyanti, Nurmalisa, Y., & Rohman. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Kepribadian Peserta Didik. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(1), 36–41.
- Sang, G., Liang, J. C., Chai, C. S., Dong, Y., & Tsai, C. C. (2018). Teachers' actual and preferred perceptions of twenty-first century learning competencies: a Chinese perspective. *Asia Pacific Education Review*, 19(3), 307–317. <https://doi.org/10.1007/s12564-018-9522-0>
- Senjiliana, A. A. M., Pitoewas, B., & Nurhayati, N. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Tata Kelola Pemerintahan. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(1), 31–38. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i1.1189>
- Sugiarti, I., & Riyanto, W. F. (2024). Understanding the Concept of Eco-Sufisme in Pekalongan, Indonesia (Analyzing Mbah Munawar and Habib Ahmad D Sahab). *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1(1), 33–43.
- Wibowo, M. A. S., Pitoewas, B., & Putri, D. S. (2024). Peranan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Mengimplementasikan Profil Pelajar Pancasila. *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(1), 31–40.